POLIGAMI DAN POWER EKONOMI (Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia)

Ahmad Dakhoir

Abstract

The motive of polygamy in Indonesia is very diverse. Public perception against one of the motives of polygamy is very strong due to economic problems. Economic motives as power for of polygamy is not always right. This paper mainstream denied the presumption that of polygamy carried out by economic forces. In short those who practice polygamy only potentially be implemented for the rich or the elite tier of other groups.

Theoretically-normatively basic theory which became one of the parameters can be polygamous in Indonesia, namely the existence of evidence of the husband's income would be polygamous is a figure that could provide for the economy to all the wives and children. The result is that a strong economic motive is considered the basis for of polygamy was not entirely right. In Surabaya, for example secretly polygamous husband of 64 polygamous marriages procedural was only earning less than Rp. 17 million. Of these 39% are self-employed husband by profession who earn no more than 2.5 million per month, and 31.3% earn Rp. 4.9 million. While polygamous husband in secret of 56 polygamous marriages only income below 24 million. Of these the most that 50% are self-employed husband by profession who earn no more than 2.4 million every month.

Keywords: Polygamy, Power Economics

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan relasi seksual pria dan wanita, yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami (*ta'addud al-zawjat*).¹ Dahulu diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cilia.² Namun hingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat dikalangan masyarakat.

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidak-adilan gender. Bahkan penulis Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki

¹ Selain poligami, masalah krusial tersebut adalah relasi seksual karena hak milik al-yamin (perbudakan) dan relasi seksual nikah kontrak. isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam bentuk yang eksplisit, isu nikah kontrak ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan poligami telah diterima secara luas, namun dengan melibatkan syarat yang ketat. Lihat : Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadith Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), ix.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 9.

sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Awal tarik ulur permasalahan poligami di Indonesia, telah mengemuka ketika dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo dalam berpoligami. Si jago poligami, demikian julukan Puspo Wardoyo, yang tak lain hanya keturunan pedagang ayam bakar dari Solo ini. Kesuksesan Puspo Wardoyo ini, bukan karena kesuksesan bisnis ayam bakar orang tuanya, melainkan sukses karena telah memoligami empat orang isteri.³ Keadaan ini, semakin laku dalam perbincangan diberbagai media, ketika persoalan poligami, dihebohkan oleh praktik poligami Aa Gym. Fenomena ini, pada akhirnya menggiring sebagian masyarakat, dimana pemahaman masyarakat kala itu, terkonstruksendengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama. Atas dasar itu pula, bagi pelaku poligami yang berhasil, patut dibanggakan karena telah berhasil membuktikan “perintah” agama tersebut. Kebanggaan itu sangat terasa dengan hadirnya *Poligami Award* (penghargaan bagi pelaku poligami), yang setiap tahun dihadiahkan kepada mereka yang dianggap berhasil dalam membina rumah tangga poligami.⁴

Berikutnya, setelah kabar poligami berangsur-angsur mereda, tampil seorang pengusaha kuningan, yaitu Sheikh Puji, yang menikah poligami. Kasus Sheikh Puji ini, tidak saja ricuh karena beristeri lebih dari satu, tetapi telah mengkaitkan Lutfiyana Ulfa, si gadis dibawah umur yang dinikahnya. “Udah poligami, anak kecil pula yang dinikahi”. Sebagai akibat dari kasus ini, akhirnya Sheikh Puji meringkuk di penjara, dengan tuduhan mengeksploitasi anak dibawah umur. Tidak berselang jauh, muncul lagi komunitas poligami di Bandung, yang dimotori oleh Global Ikhwan, yang tidak lain merupakan anak cabang dari komunitas poligami di Malaysia. Kehadiran komunitas ini, ternyata membuat masyarakat resah dimanamana. Munculnya keresahan masyarakat, khususnya yang menerpa sebagian besar kaum ibu ini, akhirnya memaksa MUI provinsi Jawa Barat, mengeluarkan fatwa pelarangan terhadap komunitas tersebut.

Bertolak dari berbagai kasus poligami di atas, tentu diperlukan penjelasan mendasar tentang poligami. Agar masyarakat tidak resah dan mengetahui persoalan-persoalan poligami. Salah satu penyebab, munculnya praktik poligami disatu sisi, dan munculnya keresahan masyarakat disisi yang lain, yakni diakibatkan minimnya pengetahuan, terhadap apa alasan atau motif yang menjadi dasar poligami. Jika alasan atau motif ini diketahui secara luas, apalagi ketika alasan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti meyakini tidak akan ada lagi pemberitaan atau kabar-kabar miring mengenai poligami. Demikian halnya dengan tata cara poligami. Masyarakat atau bahkan pelaku poligami sendiri, tampaknya belum sepenuhnya melaksanakan dan mengetahui seluruhnya tentang prosedur poligami. Efek dari masalah tersebut, pada akhirnya berujung pada ketidaktahuan terhadap implikasi sosial akibat poligami ini.

Ada beberapa fakta yang membuktikan, bahwa berdasarkan persepsi di atas, praktik poligami telah merebak di sebagian wilayah Indonesia. Setidaknya telah tercatat 989 permohonan ijin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 81 % permohonan telah dikabulkan dan diijinkan Pengadilan Agama, sedangkan 19 % permohonan ditolak. Namun, disisi lain tingkat perceraian yang diakibatkan poligami juga tidak kalah tingginya. Seperti pada tahun 2005, perceraian akibat poligami di

³ Abdul Matin Salman, *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami* (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008), 45.

⁴ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), 9.

beberapa wilayah Indonesia, seperti di Bandung, Surabaya dan Semarang. Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, setidaknya tercatat 324 perkara perceraian yang diakibatkan poligami. Urutan kedua dalam perkara yang sama juga terjadi di Surabaya dengan 162 perkara perceraian. Disusul kota Semarang dengan 104 perkara.⁵Angka-angka tersebut, tentu saja mengagetkan. Hal ini disebabkan adanya indikasi, bahwa sebagian praktik poligami yang dilakukan, tanpa didasari alasan dan melalui prosedur sebagaimana peraturan yang ada. Jika melihat data di atas, dapat dibayangkan jika melalui proses litigasi saja praktik poligami merangkak naik, lantas bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi.

Untuk mendudukan masalah tersebut, masalah poligami di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan KHI, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah azas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang isteri.⁶ Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 :⁷

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

Akan tetapi, dalam hal alasan tertentu, seorang suami diberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat tentunya. Kemudian untuk Indonesia, dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu orang, ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan Pasal 55 KHI. Tidak cukup itu, pemohon juga harus melewati beberapa prosedur persidangan di Pengadilan Agama, dengan mengajukan permohonan tertulis.

Meskipun menurut peraturan diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama, menganut

⁵ Wahyu Widiana, “Menguak Sisi Gelap Poligami,” dalam <http://www.hukumonline.com/detil.asp?id=15941&cl=fokus> (21 Februari 2006).

⁶ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 6.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115.

⁸ Al-Qur'an. 4 (al-Nisa), 3.

prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Keadaan-keadaan tersebut seperti dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain ketentuan di atas, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seperti adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan poligami juga terdapat dalam KHI, yaitu pasal 55 yang menyatakan bahwa :

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada saat bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Dari uraian pasal-pasal mengenai syarat poligami, tampak jelas bahwa untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah. Melihat latar belakang penduduk kota Surabaya yang bervariasi, baik dari segi pekerjaan, etnis, budaya dan strata sosial lainnya, tidak menutup kemungkinan pelaku poligami juga memiliki alasan yang berbeda-beda.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh LBH-APIK Jakarta, yang menyatakan bahwa alasan pelaku poligami cukup beragam, bahkan hampir seluruhnya tidak mengindahkan peraturan sebagaimana di atas. Penelitian yang difokuskan di wilayah Jakarta ini, telah menyimpulkan bahwa 47 % poligami yang dilakukan, berdasarkan suami terpengaruh atau tergoda wanita lain, 22 % poligami yang dilakukan berdasarkan alasan belum mempunyai keturunan, alasan ekonomi serta beragam alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dengan persentase yang cukup tinggi.⁹

Tidak menutup kemungkinan di Surabaya-pun demikian. Melihat wilayah Surabaya dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa, dan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, dengan variasi strata sosial yang ada, sangat mungkin terjadi perkawinan poligami yang mendasarkan pada penerapan yang bervariasi pula.¹⁰

Dari berbagai fenomena itulah, yang menyebabkan peneliti ingin menemukan apa saja motif pelaku poligami, khususnya di Surabaya. Disamping ingin menemukan apakah motif ekonomis cukup dominan bagi pelaku poligami di Surabaya.

B. Hukum Poligami Dalam Islam

Berbicara mengenai hukum poligami dalam Islam, tentu erat kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an seperti dalam surat al-Nisa' dan beberapa Hadith Nabi Muhammad saw tentang poligami. Ayat-ayat dan beberapa Hadith tersebut yaitu:

⁹Wahyu Widiana, "Menguak Sisi Gelap Poligami," dalam <http://www.hukumonline.com/detil.asp?id=15941&c1=fokus> (21 Februari 2006).

¹⁰Dinas Kependudukan Kota Surabaya, "Penduduk Surabaya Menurut Pekerjaan, Agama, Umur, dan Surabaya Berbasis RT dan RW tahun 2008," dalam <http://www.surabaya.go.id/dispenguk/?download=true&cat=stats=file=7>. (t.t.)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

Ayat di atas, merupakan salah satu keterangan/dasar hukum yang sangat terkenal untuk mengetahui hukum poligami dalam agama Islam. Dengan kata lain, jika ada pembahasan poligami, dapat dipastikan ayat inilah (Q.S. al-Nisa’: 3), satu-satunya yang paling laku digunakan. Wajar, karena ayat tersebut memang berisi penjelasan kebolehan poligami, atau menikah lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama, dengan jumlah maksimal empat orang isteri, dengan syarat yaitu adil. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu isteri saja (monogami).

Namun demikian, hukum “boleh” dalam pernikahan poligami, masih menyisakan beberapa paradigma baru dalam Islam. Menurut Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim, bahwa ayat 3 surat al-Nisa’, sering ditafsirkan parsial, sehingga seolah-olah poligami diperbolehkan begitu saja, tanpa memperhatikan bagaimana konteks turunnya ayat tersebut, dan apa sesungguhnya ide moral dibalik praktek poligami.¹² Dalam ayat 2 surat al-Nisa’ misalnya, yaitu sebagai berikut:

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar.”¹³

Ayat di atas memberikan pelajaran, bahwa sebelum ayat ini diturunkan, sudah banyak pengampu anak-anak yatim yang menyalahgunakan kekayaan anak-anak yatim serta memakannya secara batil. Selain itu, al-Qur’an juga memberikan solusi pilihan yang lebih baik, yaitu agar para pengampu yang ingin mengelola harta anak-anak yatim, dengan lebih baik mengawini gadis-gadis yatim itu, dari pada mengembalikan kekayaan mereka lantaran mereka ingin menikmati kekayaan tersebut. Hal ini tersebut dalam surat al-Nisa’ ayat 127 :

Artinya : “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah SWT menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahuinya.”¹⁴

Dalam ayat 3 surat al-Nisa’, juga dinyatakan bahwa jika para pengelola (wali) ini tidak dapat berlaku adil terhadap kekayaan gadis-gadis yatim (dan mereka bersikeras untuk

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur’a>n dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115. Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 3.

¹²Abdul Mustaqim, “Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur” *Jurnal studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadith*, Volume 8, Nomor 1 (Januari, 2007), 48.

¹³Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 2.

¹⁴Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 127.

mengawininya), maka mereka boleh mengawini gadis-gadis yatim tersebut hingga empat, asal mereka dapat berlaku adil diantara isteri-isteri. Tetapi jika khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri tersebut, maka mereka disuruh menikahi seorang saja dari gadis-gadis yatim itu. Karena hal ini, merupakan perbuatan dimana mereka tidak akan melakukan kesalahan dan penyimpangan.

Adapun dalam paradigma usul fikih, hukum poligami dapat dijelaskan dengan pertama-tama menggali beberapa lafaz/kata kunci dalam ayat 3 surat al-Nisa', seperti *fankihu*, dan *al-'adlu*. Kata *fankihu*, dalam ilmu usul fikih merupakan kata perintah/*amr*, yang berarti "maka nikahilah". Menurut mayoritas pakar ilmu fikih dan tafsir, bahwa kaidah umum mengenai "kata perintah" di dalam al-Qur'an, memiliki implikasi hukum *wajib* dan *ilzam*¹⁵, kecuali jika ada *qara'in*¹⁶ yang mengharuskan kata perintah itu diartikan lain, selain wajib. Dengan demikian, kata perintah dalam al-Qur'an menunjuk kepada dua implikasi hukum. Pertama, kata perintah yang tidak disertai *qara'in*, maka ia memiliki implikasi hukum wajib. Kedua, kata perintah yang disertai dengan *qara'in*, maka ia memiliki implikasi hukum *mubah* atau boleh.¹⁷ Karena *fankihu* merupakan bentuk kata perintah dan bermakna perintah, serta memiliki *qarinah* yaitu berupa pemenuhan syarat adil, maka hukum poligami dari segi kata *fankihu* berimplikasi hukum boleh.

Meski lafaz *fankihu* sudah dapat diketahui maksudnya, hukum poligami belum dapat dihukumi hanya dengan pendekatan makna lafaz *fankihusaja*. Selanjutnya, penelusuran kata berfokus pada lafaz *al-'adlu* yang berarti adil. Dalam ayat 3 surat al-Nisa', makna adil terdapat dalam 2 (dua) kata, yaitu kata *al-'adlu* dan kata *al-qistu*. Dengan kata lain, kata *al-'adlu* dan kata *al-qistu* memiliki makna sama yaitu adil. Menurut M. Quraish Shihab,¹⁸ kata *al-'adlu* dan kata *al-qistu* sering disinonimkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adil. Namun, ada sebagian ulama yang membedakan kedua kata tersebut dengan mengatakan bahwa kata *al-'adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Sedangkan kata *al-qistu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, dan keadilan yang menjadikan keduanya senang. Akan tetapi, karena penerapan kedua kata tersebut berada pada barisan kalimat yang memiliki konteks yang berbeda, sudah barang tentu, makna antara kata *al-'adlu* dan kata *al-qistu* berbeda pula maksudnya.

Kata *al-qistu* yang dimaksud, berada pada kalimat :
Artinya : "... dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim..." (Q.S. al-Nisa': 3)

Sedangkan kata *al-'adlu* yang dimaksud, berada pada kalimat :
Artinya : "... apabila kalian takut untuk tidak dapat berbuat adil..." (Q.S. al-Nisa': 3)

Pada kata *al-qistu*, konteks kalimat dalam potongan ayat 3 surat al-Nisa' adalah kekhawatiran tidak dapat berbuat adil pada konteks membagi harta. Oleh sebab itu, makna

¹⁵ "Keharusan."

¹⁶ "Dalil atau argumentasi yang menyertai."

¹⁷ Abdul Matin Salman, *Pendidikan Poligami (Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami)* (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008), 106. Bandingkan dengan Muhammad 'Ali al-Sabuni, dalam *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 334.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 338.

adil pada kata *al-qist* tentu saja berorientasi pada makna adil secara material, artinya berbuat adil pada kebijakan angka yang bersifat kuantitatif. Sedangkan kata *al-'adlu*, pada kalimat dalam potongan ayat 3 surat al-Nisa', merupakan kekhawatiran tidak dapat berbuat adil pada konteks membagi kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian diantara isteri-isteri. Oleh karena itu, makna adil pada kata *al-'adl* diarahkan pada makna adil secara immaterial, artinya berbuat adil pada kebijakan nilai kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian kepada isteri-isteri yang bersifat kualitatif. Karena poligami atau menikah atau memiliki isteri lebih dari satu menuntut syarat adil, yang mana adil tersebut berada pada kalimat :
Artinya : "... apabila kalian takut untuk tidak dapat berbuat adil ..." (Q.S. al-Nisa': 3)

Maka, dapat disimpulkan, bahwa maksud ayat 3 surat al-Nisa' adalah melarang poligami secara lembut, atau memperbolehkan poligami dengan syarat yang amat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil secara kualitatif, sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi.

Selain itu, dalam kajian usul fikih, syarat apapun dalam sebuah ibadah maupun hukum perikatan, biasanya berada diluar perbuatan atau rukun. Konteks syarat adil dalam poligami, tampaknya sedikit berbeda. Syarat adil dalam poligami, memiliki sisi yang unik, karena berada dalam perbuatan dan rukun pernikahan, sebagaimana halnya maskawin. Maskawin merupakan syarat, tetapi berada di dalam dan berdampingan dengan rukun, tetapi bukan rukun. Oleh sebab itu, karena syarat adil poligami memang seperti itu, dan adil tidaknya seorang suami kepada isteri-isterinya hanya dapat dibuktikan setelah poligami berlangsung, maka hukum poligami, dengan menempatkan syarat adil adalah sebuah perilaku yang dibangun berdasarkan komitmen jiwa dan moral tinggi. Menurut penulis, karakter manusia seperti ini, sungguh sulit ditemui, terlebih di zaman seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, hukum poligami pada paradigma ini, adalah sunnah tetapi harus memenuhi syarat yaitu adil.

Masih berkaitan dengan adil sebagai syarat dalam poligami, bahwa secara garis besar, adil meliputi dua hal yaitu adil dalam menggauli dan adil dalam hal memberikan keperluan hidup. Meski syarat adil yang dimaksudkan hanya sebatas pada hal-hal yang mungkin dapat dilakukan dan dikontrol manusia, keadilan pada tingkat kualitatif tetap tidak akan mampu dilakukan mengingat keterbatasan sebagai manusia. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 129 :

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."¹⁹

Adapun menurut Mahmud Saltu,²⁰ sebagaimana dikutip Titik Triwulan Tutik menjelaskan, bahwa adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Hal ini disebabkan adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atau tidak, karena hal itu mustahil dipenuhi oleh manusia. Beliau mendasarkan pada Hadith Rasulullah SAW:

¹⁹ Al-Qur'an.4 (al-Nisa'), 129.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 71.

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai dua isteri, tetapi dia lebih cenderung kepada yang salah satu, maka nanti dihari qiyamat dia akan datang dengan menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring.”²¹

Sementara itu, menurut Yusuf Qardhawi,²² adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.

Selain harus menempuh sebagaimana persyaratan dan prosedur di atas, yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami yang ingin poligami adalah adanya alasan yang realistis. Alasan inilah yang nantinya akan menjadi dasar layak tidaknya seorang suami untuk poligami. Dalam tafsir al-Maraghi, sebagaimana dikutip Tutik, menjelaskan bahwa alasan atau motif untuk dapat melaksanakan poligami, yaitu tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan, (isteri I) menderita penyakit menahun yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagaimana isteri umumnya, karakter laki-laki (suami) yang memiliki libido kuat, dan jumlah wanita yang lebih besar dari pria karena perang dan persoalan sosial lainnya.²³ Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, setidaknya ada delapan keadaan. Antara lain, isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan, isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan, isteri sakit ingatan, isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri, isteri memiliki sifat buruk, isteri mingsgat dari rumah, adanya ledakan jumlah perempuan seperti perang, dan kebutuhan beristeri lebih dari satu dapat menimbulkan mudharat dalam kehidupan dan pekerjaannya jika tidak dipenuhi.²⁴

C. Poligami dan Power Ekonomi

Dalam *Webster's New World Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Jamilah Jones,²⁵ istilah poligami didefinisikan sebagai praktek perkawinan dengan seorang wanita (isteri) atau pria (suami) lebih dari seorang pada saat yang sama. Selain istilah tersebut, poligami memiliki padanan kata, yaitu poligini. Poligini adalah praktek perkawinan dengan dua orang wanita (isteri) atau lebih pada saat yang sama. Sebaliknya, praktek perkawinan dengan dua orang pria (suami) atau lebih pada saat yang sama, disebut dengan poliandri. Adapun praktek perkawinan seorang suami/isteri dengan seorang suami/isteri pada saat yang sama disebut monogami. Terkait dengan beristeri lebih dari satu pada saat yang sama, tampaknya untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat Surabaya, lebih lazim menggunakan istilah poligami dari pada poligini.

²¹ Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistaniy. *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), 133.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214.

²³ Tutik, *Poligami Perspektif ...*, 73.

²⁴ Amior Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1 tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.

²⁵ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Plural Marriage in Islam*, Terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 1.

Secara geografis, kota Surabaya terletak diantara 07°12' - 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur. Kota Surabaya terletak diujung utara pulau Jawa. Kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,36 Km, dengan penduduk pada sensus tahun 2002 berjumlah 2.484.583 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka kepadatan penduduk Kota Surabaya rata-rata 7.613 jiwa/Km. Sedangkan pada tahun 2009, jumlah penduduk Kota Surabaya sudah mencapai hampir 3.000.000 jiwa.²⁶ Luas wilayah Surabaya tersebut dibagi dalam 5 wilayah besar, dengan 31 kecamatan yang terdiri dari 163 kelurahan. Untuk wilayah Surabaya Utara terdiri dari 7 Kecamatan. Wilayah Surabaya Selatan terdiri dari 7 Kecamatan. Wilayah Surabaya Timur terdiri dari 7 Kecamatan. Wilayah Surabaya Barat terdiri dari 6 Kecamatan. Sedangkan wilayah Surabaya Pusat terdiri dari 4 Kecamatan. Berikut tabel pembagian wilayah administrasi pemerintahan kota Surabaya :

Tabel : III.1

Tabel pembagian wilayah administrasi pemerintahan kota Surabaya.²⁷

No.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Surabaya Utara	Semampir	Ampel, Sidotopo, Pegirian, Wonokusumo, Ujung
		Krembangan	Dupak, Moro Krembangan, Perak Barat, Kemayoran, Krembangan Selatan
		Kenjeran	Tanah Kali Kedinding, Sidotopo Wetan, Bulak Banteng, Tambak Wedi
		Asem Rowo	Asem Rowo, Genteng, Kalianak Grege
		Pabean Cantikan	Bongkaran, Nyamplungan, Krembangan Utara, Perak Timur, Perak Utara
		Suko Manung.	Tanjung Sari, Suko Manunggal, Simo Mulyo, Sono Kwijen, Putat Gede
		Bulak	Sukolilo, Kenjeran, Bulak, Kedung Cowek, Komp. Kenjeran
2.	Surabaya Selatan	Wonokromo	Wonokromo, Sawunggaling, Darmo, Ngagel, Ngagel Rejo, Jagir
		Wonocolo	Sidosermo, Bendul Merisi, Margo Rejo, Jemur Wonosari, Siwalan Kerto
		Gayungan	Gayungan, Ketintang, Menanggal, Dukuh Menanggal
		Wiyung	Wiyung, Jajar Tunggal, Babatan, Balas Klumprik
		Sawahan	Sawahan, Petemon, Kupang Krajan, Banyu Urip, Putat Jaya, Pakis
		Jambangan	Karah, Jambangan, Kebon Sari, Pagesangan
		Karang Pilang	Kedurus, Kebraon, Karang Pilang, Waru Gunung
3	Surabaya Timur	Gubeng	Gubeng, Airlangga, Mojo, Kertajaya, Pucang Sewu, Barata Jaya
		Rungkut	Rungkut Kidul, Kali Rungkut, Kedung Baruk, Penjaringan Sari, Medokan Ayu, Wono Rejo
		Tambak Sari	Tambak Sari, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Rangkah, Gading
		Mulyo Rejo	Mulyorejo, Kalijudan, Manyar Sabrangan, Dukuh Sutorejo, Kali Sari, Kejawan Putih Tambak
		Sukolilo	Menur Pumpungan, Nginden Jangkungan, Klampis Ngasem, Semolowaru, Medokan Semampir, Gebang Putih, Keputih

²⁶ <http://www.sby.go.id>²⁷ Peta Surabaya, *Perkembangan dan Pembagian Administrasi Pemerintahan*, (PT. Karya Pembina Swajaya). t.t.

		Gunung Anyar	Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah
		Tenggilis Mejoyo	Tenggilis Mejoyo, Panjang Jiwo, Prapen, Kendang Sari, Kutisari
4.	Surabaya Barat	Tandes	Buntaran, Banjar Sugihan, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Bibis, Balong Sari, Karang Poh, Gadel, Tubanan, Tandes Lor, Tandes Kidul, Gedang Asin
		Benowo	Kandangan, Klakah Rejo, Sememi, , Romokalisari, Tambak Osowilang.
		Dukuh Pakis	Dukuh Pakis, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Prada Kalikendal
		Pakal	Pakal, Babat Jerawat, Tambak Dono, Sumber Rejo, Benowo
		Sambi Kerep	Bringin, Made, Sambi Kerep, Lontar
		Lakar Santri	Jeruk, Lakar Santri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Bangkingan, Sumur Welut
5.	Surabaya Pusat	Tegal Sari	Keputran, Dr. Sutomo, Tegal Sari, Wonorejo, Kedung Doro
		Simokerto	Kapasan, Tambak Rejo, Simokerto, Sidodadi
		Bubutan	Bubutan, Alun-alun Contong, Tembok Dukuh, Gundih, Jepara
		Genteng	Embong Kaliasin, Ketabang, Genteng, Peneleh, Kapasari
	5 Wilayah	31 Kecamatan	163 Kelurahan

Mengenai konstruksi sosial, budaya, dan ekonomi penduduk kota Surabaya beragam. Pada aspek sos-bud, penduduk Surabaya terdiri dari multi-etnis, seperti dari Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bali, Melayu, dan Bugis. Namun, mayoritas etnis yang tinggal di kota ini didominasi oleh etnis Suroboyoan dan Madura. Selain ditempati beberapa etnis nusantara, kota Surabaya juga digandrungi oleh etnis mancanegara, seperti Cina, India, Arab dan Spanyol.

Dari segi ekonomi, Surabaya merupakan sentra industri yang sangat vital dalam memproduksi, menerima dan mendistribusikan berbagai produk, baik berupa barang, seperti bahan-bahan kebutuhan pokok, sekunder, tersier maupun jasa. Tujuan utama dari sirkulasi ekonomi ini, tidak lain menjadikan kota Surabaya sebagai pusat perdagangan, dan memfasilitasi berbagai tuntutan kebutuhan bagi wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, NTB, NTT dan Irian Jaya. Sebagai sentra ekonomi, sangat wajar jika penduduk Surabaya memang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda, dan serba komplit. Mulai dari pembantu RT hingga pejabat, mulai dari pemulung hingga pengusaha, bahkan profesi “bondo nekat” hingga da’i tersedia lengkap di Surabaya. Tidak hanya itu, profesi menggiurkan, mulai menjual produk buatan sendiri, hingga jual diripun juga dapat dinikmati dan dijumpai dengan mudah di bumi ber-*icon* Kota Pahlawan ini.

Berkaitan dengan pernikahan (poligami), sebagian penduduk kota Surabaya juga mempraktekkan pernikahan seperti itu. Berdasarkan investigasi peneliti, ternyata pelaku poligami di Surabaya mempunyai dasar dan motif yang berbeda-beda dalam berpoligami.

Sejauh ini, tidak hanya motif poligami saja yang beragam, akan tetapi latar belakang ekonomi, pendidikan, profesi dan usia pelaku (khususnya suami), memiliki fenomena tersendiri dalam hal poligami di Surabaya. Dari 64 permohonan ijin poligami yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, mulai tahun 2005 sampai 2008, dan 56 kasus poligami secara sirri, yang berhasil diinvestigasi,²⁸ peneliti mengkatagori beberapa

²⁸ Sebenarnya, sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, permohonan ijin poligami yang sudah diputus (mendapat ijin poligami) oleh Pengadilan Agama Surabaya, secara keseluruhan berjumlah 76 permohonan.

model praktik poligami, berdasarkan konstruksi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Surabaya.

Jika dilihat berdasarkan jenis profesi dan penghasilan suami yang berpoligami, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : I
Distribusi poligami prosedural berdasarkan profesi/pekerjaan suami.²⁹

No.	JENIS PROFESI/PEKERJAAN	TAHUN				JML	%
		2005	2006	2007	2008		
1	PNS/TNI/POLRI	1	-	-	-	1	1,6
2	Advokat	-	-	-	1	1	1,6
3	Pedagang	1	2	-	-	3	4,6
4	Satpam	1	1	1	-	3	4,6
5	Sopir	-	1	-	-	1	1,6
6	Tukang Parkir	-	1	-	-	1	1,6
7	Swasta	8	9	18	18	53	82,8
8	Kolektor	-	1	-	-	1	1,6
Total		11	15	19	19	64	100

Berdasarkan tabel di atas, dalam kasus poligami yang sesuai prosedur melalui ijin Pengadilan Agama, bahwa jenis profesi yang paling banyak melaksanakan poligami adalah suami yang berprofesi sebagai wiraswasta. Jumlahnya yaitu mencapai 82% atau sebanyak 53 suami. Sementara profesi yang lain adalah pedagang dan satpam sebanyak 3 suami atau 4,6% kemudian disusul dengan profesi PNS, Advokat, Sopir, Tukang Parkir, dan Kolektor.

Tabel :2
Distribusi poligami prosedural berdasarkan penghasilan suami.³⁰

No.	JUMLAH PENGHASILAN	TAHUN				JML	%
		2005	2006	2007	2008		
1	Ikut Orang Tua/Isteri	-	-	-	-	-	-
2	< 1 Juta	2	2	-	1	5	7,8
3	1 Juta – 2,4 Juta	3	6	8	8	25	39,1
4	2,5 Juta – 4,9 Juta	4	7	3	6	20	31,3
5	5 Juta – 7,4 Juta	1	-	4	2	7	10,9
6	7,5 Juta – 9,9 Juta	1	-	1	-	2	3,1
7	10 Juta – 12,4 Juta	-	-	1	2	3	4,6
8	12,5 Juta – 14,9 Juta	-	-	-	-	-	-
9	15 Juta – 17,4 Juta	-	-	2	-	2	3,1
10	> 17,5 Juta	-	-	-	-	-	-
Total		11	15	19	19	64	100

Adapun berdasarkan penghasilan suami, dalam kasus poligami yang sesuai prosedur melalui ijin Pengadilan Agama, bahwa tingkat penghasilan yang paling banyak melaksanakan

Dengan rincian, pada tahun 2005 berjumlah 17 permohonan, tahun 2006 berjumlah 19 permohonan, tahun 2007 berjumlah 21 permohonan, dan tahun 2008 berjumlah 19 permohonan. Namun, karena sesuatu dan lain hal dari pihak Pengadilan Agama hanya memberikan informasi arsip permohonan poligami sejumlah 64 permohonan (arsip). Dengan rincian, tahun 2005 berjumlah 11 arsip, tahun 2006 berjumlah 15 arsip, tahun 2007 berjumlah 19 arsip, dan tahun 2008 berjumlah 19 arsip. Hasil *observasi* tanggal 28 Juli 2009, di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

²⁹ Arsip, *Observasi*, Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 28 Juli 2009.

³⁰ Arsip, *Observasi*, Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 28 Juli 2009.

poligami adalah suami yang berpenghasilan antara 2,4 juta sampai 4,9 juta. Jumlahnya yaitu mencapai 39,1% dan 31,3%. Sementara penghasilan yang lain adalah berpenghasilan 5-7,4 juta, adapula yang berpenghasilan hingga 17,4 juta.

Tabel :3

Distribusi poligami sirri berdasarkan profesi/pekerjaan suami.³¹

No.	JENIS PROFESI/PEKERJAAN	TAHUN PENDATAAN 2009	JML	%
1	PNS/TNI/POLRI	7 / 1 / 1	9	16,1
2	Pengusaha	7	7	12,5
3	Makelar tanah	1	1	1,8
4	Petani	3	3	5,4
5	Pedagang	1	1	1,8
6	Sopir	3	3	5,4
7	Tukang Parkir	1	1	1,8
8	Swasta	23	23	41,1
9	Karyawan	3	3	5,4
10	Tukang beca	4	4	7,2
11	Tukang Rukyah	1	1	1,8
Total		56	56	100

Sedangkan dalam kasus poligami sirri, bahwa profesi yang paling banyak melaksanakan poligami adalah suami yang berprofesi sebagai wiraswasta. Jumlahnya yaitu mencapai 41,1% atau sebanyak 23 suami dari 56 suami. Sementara profesi yang lain adalah PNS/TNI/POLRI sebanyak 16,1%, selanjutnya pengusaha sebanyak 12,5%, disusul tukang beca sebanyak 7,2%, selanjutnya petani, karyawan, dan tukang rukyah dan makelar.

Tabel :4

Distribusi poligami sirri berdasarkan penghasilan suami.³²

No.	JUMLAH PENGHASILAN	TAHUN PENDATAAN 2009	JML	%
1	Ikut Orang Tua/Isteri	-	-	-
2	< 1 Juta	5	5	8,9
3	1 Juta – 2,4 Juta	28	28	50
4	2,5 Juta – 4,9 Juta	9	9	16,1
5	5 Juta – 7,4 Juta	5	5	8,9
6	7,5 Juta – 9,9 Juta	3	3	5,4
7	10 Juta – 12,4 Juta	3	3	5,4
8	12,5 Juta – 14,9 Juta	-	-	-
9	15 Juta – 17,4 Juta	1	1	1,8
10	17,5 Juta – 19,9 Juta	-	-	-
11	20 Juta – 22,4 Juta	1	1	1,8
12	22,5 Juta – 24,9 Juta	1	1	1,8
13	25 Juta – 27,4 Juta	-	-	-
14	27,5 Juta – 29,9 Juta	-	-	-
15	> 30 Juta	-	-	-
Total		56	56	100

³¹ Hasil Wawancara, Surabaya, Tanggal 1 Agustus sampai 30 Januari 2010.

³² Hasil Wawancara, Surabaya, Tanggal 1 Agustus sampai 30 Januari 2010.

Adapun berdasarkan penghasilan suami, dalam kasus poligami sirri, bahwa tingkat penghasilan yang paling banyak melaksanakan poligami adalah suami berpenghasilan 1-2,4 juta yaitu sebanyak 28 atau 50%. Sementara penghasilan yang lain adalah berpenghasilan 5-7,4 juta yaitu sebanyak 9 suami atau 16,1%. Kemudian disusul dengan tingkat penghasilan 7 juta sebanyak 5 suami, selanjutnya 3 suami berpenghasilan 7,5 juta sampai 12,4 juta, dan suami dengan penghasilan tidak lebih dari 25 juta hanya 1 orang. Data diatas tentu saja menarik jika dikaitkan dengan alasan poligami melalui power ekonomi. Berdasarkan data di atas, ternyata poligami di Surabaya ketika dilihat dari sisi ekonomi, memiliki karakter poligami yang unik dari sisi ekonomi. Karakter tersebut mengindikasikan bahwa power ekonomi sebagai basis berpoligami ternyata tidak selamanya dominan. Artinya anggapan bahwa poligami yang selama ini dijustifikasi selalu dikaitkan hanya dapat terlaksana jika suaminya kaya ternyata tidak sepenuhnya tepat. Oleh karena itu, kata *al-'adl* dalam ayat poligami tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan dalam tanggungjawab kuantitatif ekonomi namun tanggungjawab ilahiyah berupa kasih sayang, sebagaimana kasih sayang Allah yang maha adil, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

D. Kesimpulan

Motif poligami di Indonesia sangat beragam. Anggapan masyarakat salah satu motif poligami yang sangat kuat adalah karena masalah ekonomi. Motif ekonomi sebagai power untuk poligami ternyata tidak selalu tepat. Tulisan ini membantah anggapan mainstream bahwa poligami banyak dilakukan oleh kekuatan ekonomi. Singkat kata orang yang berpoligami hanya berpotensi dilaksanakan bagi kelompok kaya atau kelompok lapis elit lainnya.

Secara teoritis-normatif, teori dasar yang menjadi salah satu parameter dapat berpoligami di Indonesia yaitu adanya bukti penghasilan suami yang akan berpoligami adalah sosok yang sanggup memberi nafkah ekonomi kepada seluruh isteri-isteri dan anak-anaknya. Hasilnya bahwa motif ekonomi yang dianggap kuat menjadi dasar untuk poligami ternyata tidak sepenuhnya tepat. Di Surabaya misalnya, suami yang berpoligami secara sirri dari 64 perkawinan poligami prosedural ternyata hanya berpenghasilan di bawah Rp. 17 juta. Dari jumlah tersebut 39 % adalah suami dengan profesi wiraswasta yang berpenghasilan tidak lebih dari 2,5 juta setiap bulan, dan 31,3 % berpenghasilan Rp. 4,9 juta. Sedangkan suami yang berpoligami sirri dari 56 perkawinan poligami ternyata hanya berpenghasilan di bawah 24 juta. Dari jumlah tersebut yang paling banyak yaitu 50% adalah suami dengan profesi wiraswasta yang berpenghasilan tidak lebih dari 2,4 juta setiap bulan..

E. Daftar Pustaka

- Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'a>n dan H}adi>th Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).
- Abdul Matin Salman, *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami* (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008).
- Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007).

- Wahyu Widiana, "Menguak Sisi Gelap Poligami," dalam <http://www.hukumonline.com/detil.asp?id=15941&cl=fokus> (21 Februari 2006)
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'a>n dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989).
- Dinas Kependudukan Kota Surabaya, "Penduduk Surabaya Menurut Pekerjaan, Agama, Umur, dan Surabaya Berbasis RT dan RW tahun 2008," dalam <http://www.surabaya.go.id/dispending/?download=true&cat=stats=file=7>. (t.t.)
- M. Agus Salim, "Kecenderungan Nikah Poligami dengan Nikah Sirri di Kabupaten Bangkalan," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).
- Abdul Mustaqim, "Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur" *Jurnal studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadith*, Volume 8, Nomor 1 (Januari, 2007).
- Muhammad 'Ali al-Sabuni, dalam *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistaniy. *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.).
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000).
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1 tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Plural Marriage in Islam*, Terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001).
- <http://www.sby.go.id>
- Peta Surabaya, Perkembangan dan Pembagian Administrasi Pemerintahan*, (PT. Karya Pembina Swajaya). t.t.